BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia tengah mengarah pada era teknologi informasi, teknologi dan informasi akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Sekarang pun hal hal yang berkaitan dengan teknologi dan informasi merupakan suatu kebutuhan yang utama. instansi atau perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang cukup, baik dari segi keberadaannya dalam mencapai suatu tujuan instansi tersebut. Informasi merupakan komponen yang penting bagi kehidupan dengan melakukan pengembangan dan inovasi teknologi informasi, hasilnya dapat memberikan kemudahan dan cara baru bagi penggunanya untuk melakukan aktifitas sehari hari secara efektif dan efesien. Sistem Informasi yang baik menurut instansi memeliki peran yang berbeda-beda yaitu informasi yang disediakan tepat pada waktunya,yang bermanfaat dan dapat diandalkan oleh suatu instansi maupun perusahaan tersebut.

Sistem informasi akuntansi adalah suatu perangkat yang terdapat pada computer yang digunakan untuk mengolah data keuangan instansi yang berhubungan pada siklus keuangan instansi, yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tanpa adanya sitem inforamasi akuntansi yang baik, segala kegiatan yang dilakuakan akan mengalami kesulitan salah satunya adalah kinerja sumberdaya yang berada dibawah pengawasannya. Oleh karena itu, Sistem Informasi akuntansi yang efektif sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang instansi atau perusahaan manapun (Kabuhung,2013:340).

Peranan sistem informasi akuntansi dengan baik dan benar sangat berpengaruh pada era saat ini karena, sistem yang berjalan dengan baik dan benar juga dapat mempermudah suatu pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bagi pihak instansi atau perusahaan merupakan hal yang penting, dikarenakan sistem informasi akuntansi menyediakan sebuah informasi yang dibutuhkan instansi atau perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengambil sebuah keputusan merupakan fungsi utama dari seorang pemimpin.

Akuntansi adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan untuk pihak pihak tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintah sendiri ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah laporan tersubut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan cacatan atas laporan keuangan. Karena akuntansi menjadi hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerrintah maka perlu dipahami bahwa adanya adanya pencatatan akuntansi baik akan meemudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

Setiap instansi memerlukan sistem akuntansi khususnya dalam pengeloaan keuangan karena itu pemerintah memandang perlu untuk meneyempurnakan sistem akuntansi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik dan juga dalam mengendalikan dan merencanakan aktifitas pendanaan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan

organisasi yang ruang lingkupnya berada pada pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengelola anggaran masing masing daerah inspektorat merupakan salah satu bagian dari SKPD yang bertanggung jawab kepada gebenur provinsi jawa timur dalam pelaksanaan pemerintah daerah.

Selain itu dengan penerapan prosedur pengelolaan kas yang baik, maka kemungkinan tingkat penyelewengan dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri, dimana telah diketahui kas adalah masalah yang paling rawan dan resiko hilangnya paling tinggi dan juga kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa *(Good Governance and Clean Government)* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Ritonga (2017) bentuk dari pengeluaran kas pada daerah berupa belanja daerah yang mengurangi saldo kas (anggaran) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dimana belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja sendiri ialah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinytakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD

dalam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah (Badrudin , 2012:97)

Undang- undang No 17 Taahun 2003 tentang keuangan negara, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah lebih difungsikan sebagai pembuat kebijakan dengan pelaksana pengelolaan keuangan daerahnya yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku penguna anggaran hal itu yang mendasari menteri dalam negaeri menerbitkan Pemedagri No 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai penyempurnaan Pemedegri No 13 Tahun 2006, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengeloaaan keuangan didaerah. Pasal 196 sampai Pasal 231 mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dibahas terkait penatausaahan pengeluaran kas meliputi:

1. Pembuatan Surat Penyediaan Dana
2. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran
3. Pembuatan Surat Perintah Membayar
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
5. Pembuatan Surat PertanggungJawaban Penggunaan Anggaran

Dalam hal ini penulis mengakat sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk objek penelitian dan mewakili langsung untuk mengetahui sistem penatausahaan pengeluaran kas, menganalisis penerapan dan prosedur penatausahaan maka dari itu penulis memilih judul untuk tugas akhir**“SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan penulisan dari studi lapang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penatausahaan pengeluaran kas yang ada pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penatausahaan pengeluaran kas Inspektorat Provinsi Jawa Timur

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studu lapang, penulisan tugas akhir ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak

1. Bagi Instansi Inspektorat Provinsi Jawa Timur

   Dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha perbaikan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Penulis

   Penulis mengharapkan dapat mendapatkan gambaran secara langsung sistem penatausahaan pengeluaran kas yang terjadi dilapangan.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat dijadikan sebagai informasi pengetahuan tentang sistem penatausahaan pengeleluaran kas di pemerintah daerah dan juga referensi bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil studi lapang ini.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang merupakan batasan dalam studi lapang yang hanya menjelaskan menegenai topik peneitian. Penelitian yang dilakuakn dalam studi lapang

ini adalah hanya pada hasil sistem penatausahaan pengeluaran kas pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memang sangat diperlukan untuk penelitian. penelitian yang dimaksud ialah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar, legkap, relevan. Metode ini memiliki beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informasi wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama sebagaian besar data yang diperoleh dari wawancara. Untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat diperlukan. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semistruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertayaan lebih fleksibel, agar pemberi informasi lebih terbuka dalam hal penyampaian informasi dan penulis melakukan wawancara dengan Ibu Primasari selaku bidang keuangan dan aset di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengajukan pertayaan sebagai berikut:

1. Apakah Inspektorat Provinsi Jawa Timur Terdapat Peengeluaran Kas pembebanan Langsung dan Pembebanan UP,GU,TU?
2. Apa saja jenis pengeluaran kas yang ada pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana Pengelolaan keuangan daerah dalam penatausahan pengeluaran di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?

b. Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis.Dalam hal ini penulis meminta data sebagai berikut:

1. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan pengeluaran Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2. Sejarah organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur
3. Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur
4. Visi Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur